



## Evaluasi Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

**Ibrahim**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Jamhur Poti**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Firman**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat : Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau  
29115

Korespondensi penulis: [ibrahimmdp12x@gmail.com](mailto:ibrahimmdp12x@gmail.com)

**Abstract.** Natuna Regency is one of the areas that has abundant marine potential and is one of the people's livelihoods. The backwardness of Natuna Regency as a lagging 3T region, foremost, and outermost is one of the obstacles that make Natuna Regency untouched from various assistance programs from the central government in providing assistance to the people in Natuna Regency. The Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is one of the programs of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in the development of small islands and spatial-based borders and the marine and fisheries sector as the main driver. The main objective of this SKPT program is to utilize the marine and fisheries potential of Indonesia's outer islands to increase the capacity of the main actors in marine and fisheries and improve the welfare of the main actors in the marine and fisheries sector in a sustainable manner. The research method used descriptive qualitative with the number of informants 3 people. The results of this study are known that: (1) the effectiveness of the integrated marine and fisheries center program in the fishing cooperative of East Bunguran District, Natuna Regency is administratively effective, because the purpose of this program is clear, which is given to cooperatives and distributed to fishermen, (2) aid ships cannot be used because capital is needed and kapa cannot be used in the Natuna Sea, (3) that the adequacy of the integrated marine and fisheries center program in the fishing cooperative of East Bunguran District, Natuna Regency is not sufficient, (4) the assistance vessels provided have been distributed equally to the KUB in East Bunguran District, (5) the community responded positively and very enthusiastic with the assistance of the ship, (6) assistance was distributed appropriately, namely to fishermen in East Bunguran District. The conclusion of the evaluation of the integrated marine and fisheries center program in the East Bunguran District Fisherman Cooperative has not been successful because the assistance vessels provided cannot be used by fishermen with specifications that are not in accordance with the wishes of the community and the conditions of the Natuna Sea. **Keywords:** Evaluation, Integrated Marine and Fisheries Center, Fisherman Cooperative.

**Abstrak.** Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi laut yang melimpah dan menjadi salah satu mata pencarian masyarakat. Keterbelakangan Kabupaten Natuna sebagai wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar yang menjadi salah satu penghambat yang membuat Kabupaten Natuna tidak tersentuh dari berbagai program bantuan dari pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan pulau-pulau kecil dan perbatasan berbasis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya. Tujuan utama program SKPT ini adalah memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan pulau terluar Indonesia untuk meningkatkan kapasitas bidang pelaku utama kelautan dan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan jumlah informan 3 orang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: (1) efektivitas dari program sentra kelautan dan perikanan terpadu di koperasi nelayan kecamatan bunguran timur kabupaten natuna secara administrasi sudah efektif, karena tujuan dari program ini sudah jelas yaitu diberikan kepada koperasi dan disalurkan kepada nelayan, (2) kapal bantuan tidak bisa digunakan dikarenakan dibutuhkan modal dan kapal tidak bisa digunakan di laut natuna, (3) bahwa kecukupan dari program sentra kelautan dan perikanan terpadu di koperasi nelayan kecamatan bunguran timur kabupaten natuna belum mencukupi, (4) kapal bantuan yang diberikan sudah dibagi rata kepada KUB yang ada di kecamatan bunguran timur, (5) masyarakat merespon positif dan sangat antusias dengan adanya bantuan kapal tersebut, (6) bantuan

Received Mei 17, 2024; Accepted Juni 13, 2024; Published Juni 30, 2024

\* Ibrahim, [ibrahimmdp12x@gmail.com](mailto:ibrahimmdp12x@gmail.com)

**EVALUASI PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI KOPERASI NELAYAN  
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA**

disalurkan dengan tepat yaitu kepada nelayan di kecamatan bunguran timur. Kesimpulan dari evaluasi program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu di koperasi nelayan kecamatan bunguran timur belum berhasil dikarenakan kapal bantuan yang diberikan tidak bisa digunakan oleh nelayan dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan kondisi laut natuna.

**Kata kunci:** Evaluasi, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, Koperasi Nealayan.

## **LATAR BELAKANG**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat sebuah Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Mengacu pada hal tersebut pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/permen-kp/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan yang mengatakan pasal 1 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus melaksanakan pembangunan di 13 kawasan SKPT secara terpadu yakni Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Sebatik, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, dan Moa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/permen-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan memprioritaskan 12 wilayah pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang tersebar dari aceh hingga papua yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, Dan Mimika. Dari 12 wilayah tersebut, Kabupaten Natuna menjadi salah satu prioritas pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan pulau-pulau kecil dan perbatasan berbasis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya. Tujuan utama program SKPT ini adalah memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan pulau terluar Indonesia untuk meningkatkan kapasitas bidang pelaku utama kelautan dan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan secara berkelanjutan (Munaeni et al., 2022).

SKPT Natuna memiliki beberapa fasilitas pokok untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan kelautan dan perikanan, mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan, hingga pemasaran. Fasilitas pokok ini antara lain dermaga berukuran 8 x 100 meter untuk tempat bersandar kapal dibawah 30 gross ton (GT), dermaga berukuran 8 x 120 meter untuk tempat bersandar kapal diatas 30 GT. Hingga saat ini sudah tercatat 197 kapal yang mendarat di pelabuhan selat lampa dengan rincian 73 unit kapal dibawah 10 GT, 48 unit kapal berukuran 10-30 GT, dan 16 unit kapal berukuran diatas 30 GT. Ikan hasil tangkapan nelayan yang dominan di SKPT Natuna yaitu, cumi, ikan karang, dan tongkol yang ditangkap menggunakan alat penangkapan ikan seperti bubu ikan.

Selain melakukan pembangunan sebagai penunjang utama, program SKPT juga melakukan kegiatan penyaluran bantuan dari berbagai pihak terutama oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Beberapa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat diantaranya penyaluran bantuan kapal tangkap dan alat tangkap. Adapun bantuan kapal tangkap yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui program SKPT di Kabupaten Natuna tahun 2016/2017 sebanyak 70 unit terdiri dari kapal penangkap ikan 5 GT (50 unit), 10 GT (13 unit), 20 GT (5 unit), dan kapal angkut ikan 37 GT (2 unit) diberikan kepada 11 koperasi nelayan di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/Kepmen-Kp/2016 Tentang Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan menetapkan bahwa susunan organisasi pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan terdiri atas unit administrasi dan unit operasional. Berdasarkan efektivitas dari bantuan kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui program SKPT di koperasi nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kurang efektif dikarenakan spesifikasi dari kapal bantuan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik laut natuna. Program SKPT dari menteri kelautan dan perikanan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat belum bisa mencapai tujuan dikarenakan kurangnya pemanfaatan bantuan kapal tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap bantuan tersebut sehingga bisa diketahui titik permasalahannya agar program bantuan selanjutnya tidak mengalami hal yang sama. Evaluasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kegiatan, evaluasi bukan hanya sekedar proses menentukan nilai kualitatif atau kuantitatif saja, tetapi juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang berjalan (Su'adah et al., 2007).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Evaluasi**

Menurut William Dunn (2000: 29) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Hasbullah & Anam, 2019). Evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menemukan dan menggali informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dievaluasi sehingga bisa diolah dan mencari titik permasalahan dari kebijakan itu sendiri dan dapat menyimpulkan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi kegagalan dalam implementasi kebijakan publik.

Menurut (Dwidjowijoto, 2006) ada empat pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, sebagai berikut:

1. Evaluasi komparatif, membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
2. Evaluasi historikal, membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan- kebijakan tersebut.
3. Evaluasi laboratorium atau eksperimen, evaluasi dengan menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.
4. Evaluasi *ad hock*, evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran pada saat itu.

Menurut Winarno, evaluasi kebijakan secara luas dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan estimasi dan penilaian sebuah kebijakan yang menyangkut substansi implementasi dan dampak (Silitonga, 2022). Pemilihan evaluasi kebijakan publik disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari kebijakan publik itu sendiri. Pelaksanaan evaluasi kebijakan publik yang biasa digunakan adalah evaluasi komparatif yaitu dengan membandingkan kebijakan yang sama dari kebijakan sebelumnya. Evaluasi komparatif tidak mudah untuk dilakukan dalam sebuah evaluasi kebijakan, akan tetapi muncul beberapa kesulitan dalam pelaksanaannya.

### **2. Evaluasi Program**

Evaluasi program merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan secara tersusun dalam investigasi mengenai suatu hal yang berharga dalam suatu objek (Muryadi, 2017). Evaluasi program adalah suatu usaha dalam mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sebuah program yang seterusnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam sebuah pengambilan keputusan mengenai sebuah program (Ambiyar & D, 2019).

Menurut (Muryadi, 2017) dalam evaluasi program ada beberapa model yang dikembangkan oleh beberapa ahli yang bisa digunakan di antaranya:

1. *Discrepancy Model* (Provus)

Menurut fernandes, 1948 model evaluasi *Discrepancy Model* yaitu untuk melihat tingkat kesesuaian antara baku dalam sebuah program dengan kinerja yang sebenarnya dari program itu sendiri.

2. *CIPP Model* (Daniel Stufflebeam's)

Evaluasi konteks (context) adalah untuk mengukur kebutuhan, masalah, aset, dan peluang yang bertujuan sebagai pendukung dalam membuat kebijakan, menentukan tujuan, prioritas, dan membantu kelompok pengguna yang lain dalam mengetahui tujuan, peluang, dan hasilnya.

**3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKTP)**

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan sebuah program yang dibuat oleh kementerian kelautan dan perikanan. Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program tersebut. SKPT di Kabupaten Natuna mulai dibangun sejak dari tahun 2015 sampai 2019. Program ini dibuat untuk mengembangkan perikanan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil. Program tersebut dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, tempat produksi, investasi, beragam produk yang disalurkan, dan meningkatkan nilai ekspor (Srialdoko, 2019).

Pengembangan SKPT berfokus pada peningkatan nilai tambah hasil laut, peningkatan daya saing, modernisasi korporatisasi usaha hasil laut, dan penguatan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan (Zamroni et al., 2019). Kesenjangan sosial di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan menjadi salah satu masalah yang sering terjadi. Adanya program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan menjadi salah satu inovasi terobosan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial di kawasan tersebut. Kesenjangan sosial tersebut disebabkan oleh letak wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan yang mengakibatkan wilayah perbatasan tidak tersentuh oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kurangnya pembangunan infrastruktur penunjang masyarakat tidak terpenuhi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif, objek dan lokasi penelitian juga ditentukan melalui observasi dan ditentukan di wilayah Kecamatan Bunguran Tyimur Kabupaten Natuna, penelitian ini memiliki fokus pada mengetahui dan

mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kapal bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna serta diberikan kepada pihak yang berhak menerima. Sumber data yang dilakukan secara primer dan sekunder, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi menurut William N Dunn (2000: 29) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Berdasarkan pengertian diatas dalam sebuah evaluasi dibutuhkan aspek-aspek penilaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dan program. Indikator dalam Evaluasi Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menggunakan teori William N Dunn (2003:610) yang terdapat enam indikator penilaian yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan.

### **1. Efektivitas**

Menurut hidayat (1986) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Dalam hal ini efektivitas memberikan pengaruh besar terhadap sebuah kebijakan dan menentukan kualitas dan kuantitas berdasarkan jangka waktu tertentu dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Keberhasilan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam keberhasilan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

Secara koordinatif Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah sudah efektif. Dari segi pemanfaatannya bantuan kapal yang disalurkan melalui koperasi nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tidak efektif, dikarenakan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kondisi laut di Natuna. Tujuan dari program ini sudah jelas yaitu disalurkan melalui koperasi nelayan Perbatasan Lubuk Lumbang Sejahtera, Natuna Mandiri Sejahtera, dan disalurkan kepada nelayan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat nelayan. Dalam pemanfaatannya masih terdapat beberapa kekurangan seperti spesifikasi kapal tidak sesuai dengan kondisi laut Natuna. Spesifikasi kapal bantuan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dibuat dengan bahan Fiber dengan ukuran 5 GT, 10 GT, 20 GT, dan kapal angkut ikan 37 GT.

## **2. Efisiensi**

Untuk melihat keberhasilan dari kebijakan publik dan program maka bisa dilihat dari efisiensi, semakin kecil sumber daya yang dikeluarkan maka semakin efisien sebuah kebijakan dan program. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) makna efisiensi adalah ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Secara umum efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga atau waktu.

Pelaksanaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dikatakan sudah terlaksana dengan baik harus memenuhi beberapa kriteria dari efisiensi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai efisiensi Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdapat kapal bantuan yang diberikan disandarkan di dermaga dengan jangka waktu yang lama dimulai dari kapal bantuan tersebut disalurkan. Dibutuhkan modal untuk mengoperasikan kapal bantuan tersebut. Koperasi tidak bisa memberikan modal kepada nelayan untuk mengoperasikan kapal bantuan di karenakan tidak ada pemasukan dari kapal bantuan.

Masyarakat nelayan tidak memiliki modal untuk mengoperasikan kapal bantuan tersebut dikarenakan kapal dianggap beresiko untuk dioperasikan di laut natuna sehingga tidak mendapatkan pendapatan dari kapal bantuan yang telah disalurkan. Koperasi nelayan di kecamatan bunguran timur sudah memiliki izin tempat usaha dan izin ganggu. Sertifikasi pada koperasi nelayan kecamatan bunguran timur menandakan koperasi tersebut sudah layak untuk disalurkan bantuan dari kementerian kelautan dan perikanan indonesia.

## **3. Kecukupan**

Kecukupan menurut William N Dunn (2003) mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pelaksanaan kebijakan dan program dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik, sehingga kebijakan yang telah

dilaksanakan bisa menyelesaikan masalah. Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna harus memenuhi indikator kecukupan untuk mendukung keberhasilan dari Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang menjadi salah satu aspek dalam menentukan keberhasilan dari program itu sendiri. Aspek kecukupan dilihat dari tersedianya kebutuhan, nilai sebagaimana yang dikatakan oleh William N Dunn.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai kecukupan program sentra kelautan dan perikanan terpadu di koperasi nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna jika bisa dimanfaatkan dengan baik maka jumlah kapal bantuan yang diberikan tidak cukup untuk disalurkan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Namun dengan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan Kecamatan Bunguran Timur maka kapal bantuan yang disalurkan tidak digunakan oleh nelayan. Jumlah bantuan yang disalurkan melalui koperasi nelayan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berkaitan dengan kecukupan penyaluran kapal bantuan oleh menteri kelautan dan perikanan sesuai dengan porsi masing-masing koperasi.

#### **4. Pemerataan**

Indikator selanjutnya dalam evaluasi kebijakan dan program yaitu pemerataan yang dimana untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan yang berfokus pada keadilan yang diberikan kepada publik. Menurut Winarno (2002:187) pemerataan dalam sebuah kebijakan publik dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Sedangkan menurut William N Dunn (2003) kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya usaha secara adil didistribusikan. Dalam sebuah kebijakan pemerataan menjadi indikator yang harus diperhatikan agar kebijakan dapat didistribusikan secara adil.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai pemerataan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ketidaksesuaian spesifikasi kapal bantuan yang diberikan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sehingga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. kapal bantuan tersebut dikategorikan tidak bisa disalurkan secara merata dikarenakan nelayan tidak mau menerimanya.

#### **5. Responsivitas**

Menurut William N Dunn (2003) responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk mengukur kebijakan berdasarkan responsivitas yaitu melihat reaksi masyarakat terhadap kepuasan apa yang dibutuhkan. Keberhasilan kebijakan bisa diukur melalui responsivitas masyarakat terhadap kebijakan dan program itu diimplementasikan. Kriteria responsivitas penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Masyarakat merespon positif dan sangat antusias dengan adanya Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan harapan bantuan yang diberikan tersebut sesuai dengan spesifikasi kapal yang diinginkan nelayan disalurkan dengan tepat sasaran. Akan tetapi bantuan kapal yang disalurkan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tidak bisa digunakan di laut Natuna dikarenakan kondisi kapal yang tidak memungkinkan sehingga kapal tidak digunakan dan hanya disandarkan di dermaga tanpa adanya kegiatan operasional.

## **6. Ketepatan**

Evaluasi kebijakan tidak terlepas dari ketepatan dalam implementasinya yang menjadi salah satu kriteria yang penting untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut William N Dunn (2003) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Dalam penyaluran bantuan dari Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sudah tepat sasaran, pemanfaatan bantuan yang diberikan timbul beberapa kendala yang menyebabkan bantuan tidak dimanfaatkan dengan tepat. Tujuan dari penyaluran kapal bantuan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yaitu memberikan sarana kepada nelayan dalam menangkap ikan dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

Setelah bantuan kapal tangkap disalurkan ke koperasi dan dibagikan kepada nelayan, kapal bantuan tersebut tidak digunakan dikarenakan kondisi fisik kapal bantuan tidak sama dengan yang digunakan oleh nelayan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kapal yang digunakan nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terbuat dari kayu. Sedangkan kapal bantuan yang diberikan oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan terbuat dari Fiber sehingga beresiko jika dioperasikan di laut Natuna dengan cuaca yang sering berubah dan ombak yang besar.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Evaluasi Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sudah efektif. Adanya bantuan yang diberikan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menandakan adanya keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat nelayan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk meningkatkan pendapatan nelayan sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Akan tetapi bantuan yang diberikan tidak bisa digunakan oleh nelayan dikarenakan spesifikasi kapal tidak sesuai dengan keinginan masyarakat nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan kondisi laut Kabupaten Natuna.

Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna secara administratif sudah efektif. Akan tetapi pemanfaatan kapal bantuan tersebut belum efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kondisi fisik kapal tidak sesuai dengan keinginan masyarakat nelayan, kapal tidak bisa digunakan di laut Natuna dengan cuaca yang sering berubah, dan modal operasional.

Kapal bantuan tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapatkan pendapatan. Dengan tidak beroperasinya kapal maka masyarakat nelayan tidak memiliki modal untuk biaya perawatan dan operasional kapal sehingga kapal menjadi terbengkalai di dermaga. Dengan begitu Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menjadi tidak efisien.

Tujuan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan bentuk bantuan kapal tangkap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kapal bantuan tersebut tidak memberikan pendapatan kepada nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sehingga masyarakat nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kapal bantuan tersebut.

Penyaluran kapal bantuan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dibagi secara merata di koperasi dan disalurkan ke nelayan yang bergabung di Kelompok Usaha Bersama (KUB) sesuai dengan porsi masing-masing. Nelayan yang sudah mendapatkan bantuan tidak akan diberikan lagi jika ada bantuan lagi sehingga ada pemerataan.

Masyarakat merespon positif dan sangat antusias adanya penyaluran bantuan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna jika disalurkan dengan tepat sasaran. Penyaluran kapal bantuan melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna disalurkan melalui koperasi dan diberikan kepada masyarakat nelayan anggota kelompok usaha bersama (KUB) yang tentunya berstatus sebagai nelayan. Akan tetapi tidak memberikan manfaat kepada nelayan dan terkendala di spesifikasi, dan modal operasional kapal.

## DAFTAR REFERENSI

- Ambiyar, & D, M. (2019). *metode penelitian evaluasi program*. alfabeta.
- Dwidjowijoto, riant nugroho. (2006). *kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. PT Elex Media Komputindo.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Munaeni, W., Cahyanurani, annisa bias, Puspitasari, I., Jabbar, firmansyah bin abd, Jufri, A., Pariakan, A., Nadia, laode muhamad hazairin, Nugraha, jefri putri, & Mareta, Z. (2022).

**EVALUASI PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI KOPERASI NELAYAN  
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA**

*pengantar ilmu perikanan dan kelautan* (M. S. mila sari, S.ST. (ed.)). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Muryadi, A. D. (2017). metode penelitian evaluasi program. In *jurnal ilmiah PENJAS* (Vol. 21, Nomor 2).

Silitonga, D. (2022). *evaluasi dan implementasi kebijakan publik*. zahira media publisher.

Srialdoko, J. (2019). Strategi Pengembangan PPN Merauke Untuk Mendukung Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). *Journal of Fisheries and Marine Research*, 3(2), 206–215.

Su'adah, Habib, A., Pujileksono, S., Sukmana, O., DS, vina salviana, Kurniawan, luthfi jayadi, Lendriyono, F., & Kartono, R. (2007). *pembangunan kesejahteraan sosial* (F. Lendriyono (ed.)). UPT. penerbitan universitas muhammadiyah malang.

Zamroni, A., Hajar Suryawati, S., Ramadhan, A., & Koeshendrajana, S. (2019). Pengembangan Industri Perikanan Di Kabupaten Pulau Morotai: Sebuah Konsep Ilmiah Untuk Model Integrasi Ekonomi (Fishery Industry Development in Morotai Island Regency: A Scientific Concept for Integrated Economics Model). *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 2, 15–34.